



**DISDUKCAPIL BADUNG LUNCURKAN
KAMPUNG GISA**

Hal. 9



**KLUNGKUNG KEMBANGKAN
WISATA "ADVENTURE"**

Hal. 13



**BERPENUMPANG 1.050 WISATAWAN
KAPAL PESIAR | HAL
SANDAR DI BULELENG | 16**

PKB 2019 Padukan Gong Kebyar dan Permainan Tradisional

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali merancang program materi parade gong kebyar anak-anak dalam Pesta Kesenian Bali 2019 akan dipadukan dengan unsur “meplalianan” atau permainan tradisional.

“Dipadukan dengan meplalianan ini supaya garapan gong kebyar anak-anak menjadi lebih inovatif. Kalau pada Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun-tahun sebelumnya, biasanya dipadukan dengan fragmentari,” kata Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan Disbud Bali Ni Wayan Sulastriani disela-sela kegiatan ‘Workshop Garapan Meplalianan sebagai Materi Parade Gong Kebyar Anak-Anak dalam PKB 2019’, di Denpasar, Selasa.

Menurut Sulastriani, garapan “meplalianan” tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan “dolanan” yang

telah ditampilkan dalam Pesta Kesenian Bali tahun-tahun sebelumnya, namun kini dikemas masuk Parade Gong Kebyar Anak-Anak.

“Lewat kegiatan workshop ini kami ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mendasar, supaya para penggarap tidak salah menuangkan dalam garapan untuk Pesta Kesenian Bali yang akan dimulai pada 15 Juni mendatang,” ujarnya.

Sedangkan pelaksanaan PKB tahun ini akan mengangkat tema “Bayu Premana, Memuliakan Sumber Daya Angin” yang dapat dimaknai bagaimana khususnya masyarakat Bali dapat menghormati, menghargai, dan memuliakan angin dalam kehidupan.

Sementara itu, budayawan Dewa Putu Beratha, sebagai narasumber dalam workshop



Para narasumber dalam kegiatan Workshop Garapan Meplalianan sebagai Materi Parade Gong Kebyar Anak-Anak dalam PKB 2019 di Disbud Bali (Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma)

tersebut mengatakan penggunaan istilah “meplalianan” dalam PKB tahun ini mengacu pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kalau tahun-tahun sebelumnya digunakan istilah “dolanan” yang merupakan bahasa Jawa.

“Dengan mengganti menjadi istilah ‘meplalianan’ selain untuk menguatkan kearifan lokal Bali sesuai UU Kebudayaan, sekaligus sesuai komitmen Pak Gubernur mengenai perlindungan bahasa Bali,” ucapnya. (ant)

Istri Gubernur Serahkan Penghargaan “Hatinya” PKK di Buleleng



Istri Gubernur Bali yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putu Putri Suastini Koster menyerahkan Penghargaan “Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman” (Hatinya) PKK dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp27 juta dalam program Harmonisasi dan Sinkronisasi Gerakan PKK Tahun 2019 di Desa Jinengdalem, Buleleng, Bali, Selasa. (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana)

Istri Gubernur Bali yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putu Putri Suastini Koster menyerahkan Penghargaan “Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (Hatinya) PKK dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp27 juta dalam program Harmonisasi dan Sinkronisasi Gerakan PKK Tahun

2019 di Desa Jinengdalem, Buleleng, Bali, Selasa.

Putri Koster mengajak seluruh masyarakat Desa Jinengdalem untuk menjadi masyarakat mandiri dan tidak selalu berserah diri menanti bantuan dari pemerintah. “Kemandirian itu antara lain menanam tanaman sayur mayur di halaman rumah,

jika tidak memiliki bibit bisa membuat bibit sendiri. Misalnya saat mengolah sambal, sisihkan batu cabainya untuk ditanam, sehingga dikemudian hari bisa tumbuh menjadi bibit,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan ibu-ibu dari sekarang sudah menata “disini ada tanah, disitu tempat cabai”, tetapi bukan sembarang tanaman, melainkan tanaman yang bermanfaat dan sewaktu-waktu bisa dipanen dan dalam jangka panjang dapat menghemat.

Selain itu, Putri juga menyampaikan melalui kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi gerakan PKK, diharapkan seluruh rumah tangga mampu memiliki lahan walau hanya kecil untuk ditanami tanaman obat keluarga (TOGA) maupun sayur-sayuran, agar program PKK berjalan dengan baik dan diterapkan oleh seluruh rumah tangga.

“Bila masyarakat mampu membuat kebunnya sendiri di-

rumah dengan baik, kami akan mengirim tim penilai secara diam-diam untuk memberikan penilaian, dan kepada pemilik kebun terbaik akan diberangkatkan ke Thailand untuk mengikuti studi banding,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng Gusti Aries Suradnyana berpesan kepada Ibu-Ibu PKK agar mampu menciptakan kemandirian pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah sendiri, dimana di dalam perkarangan ada toga, karang kitri, karang sari dan lumbung hidup juga dapat menghasilkan karbohidrat.

“Program Hatinya PKK merupakan salah satu program terapan dari 10 program pokok PKK yang sesungguhnya lebih dominan mengacu pada penyediaan pangan keluarga, yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga,” ujarnya. (ant)

Wagub Bali Minta “Pasemetonan” Kuatkan Karakter Umat



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat menghadiri Pesamuan Agung Trah Ida Dhalem Shri Aji Tegal Besung di Pura Dalem Samprangan, Gianyar, Sabtu. Foto Humas Pemprov Bali

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta “pasemetonan” atau klan di daerah itu untuk turut serta menguatkan karakter umat, khususnya generasi muda.

“Pasemetonan harus terus

meningkatkan karakter umatnya, terlebih di era kemajuan teknologi saat ini, di tengah persoalan yang dihadapi generasi sekarang berbeda dengan generasi pendahulunya,” kata Wagub Bali yang akrab dipanggil Cok Ace itu saat membuka

Pesamuan Agung Trah Ida Dhalem Shri Aji Tegal Besung di Pura Dalem Samprangan, Gianyar, Sabtu.

Menurut dia, perubahan yang begitu cepat terjadi di berbagai bidang dan era keterbukaan telah menyebabkan terjadinya perubahan sistem nilai, baik yang berkaitan dengan pendidikan moral, etika dan spiritualitas hidup beragama.

“Untuk itu, kita harus mampu beradaptasi dan mengendalikan diri dengan baik, sehingga apa yang menjadi makna dari kehidupan sosial dan beragama dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

“Pasemetonan” diharapkan dapat mewujudkan generasi muda Hindu yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi, memiliki karakter kuat, kecerdasan berpikir dalam melaksanakan *sradha* (keper-

cayaan) dan bakti.

Wagub Cok Ace juga berharap dengan pelaksanaan “pesamuan agung” atau rapat akbar yang dilaksanakan untuk pertama kalinya ini dapat meningkatkan peran pasemetonan dalam membangun Bali dengan berlandaskan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Dengan acara seperti ini juga diharapkan muncul pemikiran-pemikiran yang cerdas untuk dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan dharma agama (kewajiban beragama) dan dharma negara (kewajiban ber-negara).

Pesamuan Agung Trah Ida Dhalem Shri Aji Tegal Besung dihadiri oleh para penglisir (tetua) Manca Agung Trah Ida Dhalem Shri Aji Tegal Besung serta anggota pesemetonan dari sembilan kabupaten/kota se-Bali. (ant)

Gubernur Koster Janji Perkuat Fasilitas PHDI Bali

Gubernur Bali Wayan Koster berjanji akan memperkuat fasilitas sarana dan prasarana Parisada Hindu Dharma Indonesia provinsi setempat agar dapat menjalankan tugas keumatan dengan lebih baik.

“Mulai tahun 2020, saya akan memperkuat PHDI. Parisada harus memiliki kantor yang bagus sehingga bisa bekerja dengan baik,” kata Koster saat menerima jajaran pengurus PHDI Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali, di Denpasar, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan rasa hormatnya terhadap para *sulinggih* (pendeta Hindu) dan jajaran pengurus PHDI Provinsi Bali.

Ia mengajak pengurus PHDI di Bali untuk bersamasama mewujudkan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Untuk mendukung hal itu, maka gubernur asal Buleleng ini berjanji akan memperkuat PHDI.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan untuk tahun 2019 ini ada prioritas lain sehingga belum bisa dilakukan perbaikan fasilitas fisik.

“Namun, dari sisi regulasi kami sudah mencoba memperkuat adat budaya dan agama di Bali. Misalnya dengan diterbitkannya Pergub Nomor 79 dan 80 Tahun 2018 tentang busana adat dan penggunaan aksara dan bahasa Bali,” ujarnya.

Selain itu lahirnya Pergub tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik merupakan bagian dari upaya untuk menjaga alam sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Ke depan, kami segera menerbitkan Perda tentang Desa Adat dan Pergub tentang Pengelolaan Sampah yang diharapkan bisa menjaga adat, budaya, agama dan alam Bali. Kami berharap dengan dukungan dari PHDI dan MUDP Bali serta para *sulinggih* tujuan



Gubernur Bali Wayan Koster berfoto bersama dengan jajaran PHDI Bali dan kabupaten/kota (Antaraneews Bali via Humas Pemprov Bali)

mulia menjaga Bali bisa tercapai,” kata Koster.

Sementara itu, Ketua PHDI Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana menyampaikan apresiasi pada Gubernur Bali yang mau menjalin komunikasi dengan PHDI Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-

Bali.

Ia berharap nantinya PHDI Bali dapat memiliki fasilitas yang mumpuni untuk beraktualisasi. Saat ini menurutnya PHDI Kabupaten/Kota belum memiliki kantor sama sekali. Baru PHDI Bangli yang sedang membuat kantor. (ant)

Pemkot Denpasar Usulkan Ngaro-Janger-Legong Jadi WBTB Indonesia 2019



Salah satu tari tradisional Kota Denpasar yang diusulkan ke WBTB Indonesia (Antaraneews Bali/Komang Suparta/IST)

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan kembali mengusulkan empat kebudayaan untuk dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia tahun 2019.

“Adapun empat kebudayaan tersebut, yakni Tradisi Ngaro di Banjar Madura Intaran Sanur, Tari Janger Kedaton Sumerta

dan Pegok, Tari Legong Binoh dan Sate Renteng,” kata anggota Tim Cagar Budaya Kota Denpasar Yudhu Wasudewa saat dikonfirmasi di Denpasar, Minggu.

Ia menjelaskan Dinas kebudayaan Kota Denpasar terus berkomitmen untuk mendata dan melindungi kebudayaan yang ada di Kota Denpasar. Selain melaksanakan pendataan,

usulan sebagai WBTB Indonesia juga penting sebagai salah satu bentuk inventarisasi kebudayaan.

Menurut Yudhu Wasudewa, usulan itu sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Selain itu, pendaftaran ini juga merupakan tindak lanjut atas pendataan WBTB yang telah dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Dalam penetapan sebagai WBTB Indonesia, beragam tahapan harus dilalui. Hal ini meliputi form usulan penetapan, kajian akademis, foto dan video visual. Namun demikian pihaknya tetap optimis empat kebudayaan Denpasar yang diusulkan tahun 2019 dapat ditetapkan menjadi WBTB Indonesia tahun 2019.

“Tahun 2018, kita telah mendaftarkan empat kebudayaan. Dan keempatnya telah ditetapkan sebagai WBTB In-

doesia 2018, dan tahun 2019 kita mendaftarkan empat lagi, semoga keempatnya dapat ditetapkan seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Kebudayaan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram mengatakan bahwa usulan pendaftaran WBTB Indonesia ini dilaksanakan guna mendorong masyarakat untuk lebih tertarik dan sadar untuk ikut serta dalam melestarikan kebudayaan.

Selain itu, dengan terdapatnya sebagai WBTB tentunya kebudayaan di Denpasar selain tercatat di portal daerah juga tercatat dalam portal nasional guna menghindari klaim dari negara lain.

“Semoga keempatnya dapat ditetapkan sebagai WBTB Nasional tahun 2019, dan Denpasar dapat tetap eksis di tingkat nasional bahkan di dunia,” ujarnya. (ant)

Pemerintah Kota Denpasar Susun RKPD 2020

Pemerintah Kota Denpasar, Bali menyelenggarakan forum konsultasi publik sebagai upaya memberikan wadah aspirasi bagi seluruh elemen masyarakat serangkaian penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020.

Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra di Denpasar, Selasa, menekankan bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik ini diharapkan mampu menjadi ajang penyerapan aspirasi dari berbagai kalangan yang belum terserap dalam mekanisme formal. Seperti halnya musyawarah pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kecamatan.

“Kami sangat harapkan forum ini dapat melengkapi kekurangan perencanaan dalam mendukung percepatan pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

ar,” ujarnya.

Wali Kota Rai Mantra menambahkan bahwa pembentukan ekosistem kerja sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, sehingga yang menjadi skala prioritas pembangunan dapat diwujudkan serta memberi kemanfaatan bagi masyarakat.

“Dari forum ini tentunya wajib menghasilkan program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan yang terpenting juga adalah pemahaman tentang SAKIP sebagai parameter produktivitas pelayanan instansi pemerintahan,” ucapnya.

Ketua Panitia Forum Konsultasi Publik, Ni Luh Nyoman Rai Suryati menjelaskan pelaksanaan fkegiatan tersebut merupakan kegiatan guna menghimpun aspirasi dan masukan masyarakat. Hal ini berkenaan dengan pe-

nyempurnaan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2020.

Tema yang diangkat dalam forum konsultasi publik kali ini adalah “Meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Sehingga fokus pembangunan Kota Denpasar dapat disempurnakan sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma mengatakan bahwa tahun 2020 Kota Denpasar telah menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni Peningkatan kualitas SDM yang didukung pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Kedua yakni Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan



Wali Kota Denpasar Rai Dharmawijaya. (Antaraneews Bali/Komang Suparta/IST)

konektivitas.

Ketiga membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif untuk menumbuhkan berkembang wirausaha. Keempat memantapkan pembangunan berbasis budaya. Serta yang kelima memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. (ant)

Perusahaan Daerah Denpasar Lakukan Kesepakatan Bersama Kejari



Wali Kota Denpasar Rai Mantra bersama Kejari Jahezkiel Devy Sudarso Denpasar (Antaranews Bali via Humas Denpasar)

Tiga Perusahaan Daerah (PD) milik Pemkot Denpasar, Bali melakukan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dalam upaya memaksimalkan kinerja.

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Jahezkiel Devy Sudarso di Denpasar, Kamis,

menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut merupakan pengamalan dari Pasal 30 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun tiga Perusahaan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, yakni Perusahaan Dae-

rah (PD) Pasar, PD Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PD Parkir.

Jahezkiel mengatakan ada pun alasan mendasar yang menyebabkan kejaksan diberi peran dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, yakni masih banyak adanya aktivitas dalam menunjang kesejahteraan masyarakat memungkinkan bersentuhan dengan hukum perdata dan tata usaha negara.

"Instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat memungkinkan adanya aktivitas yang bersinggungan dengan hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga untuk mengurangi hal tersebut kerja sama ini dapat menjalankan salah satu tugasnya yakni memberi pendampingan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra turut mengapresiasi terjalinnya kerja sama atau kesepakatan bersama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara ini. Dengan adanya kesepakatan bersama ini artinya seluruh OPD dan perusahaan daerah di lingkungan Pemkot Denpasar secara umum telah mendapatkan pendampingan hukum dari Kejari Denpasar.

Rai Mantra menekankan bahwa momentum ini hendaknya dimanfaatkan sebagai upaya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk dapat memperkecil celah pelanggaran serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Sehingga upaya dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat dapat terus dilaksanakan. (ant)

Pemkot Denpasar Gandeng FIB Unud Gelar Seminar "Bahasa Ibu"

Beragam kegiatan dirangsang turut menyambut HUT ke-231 Kota Denpasar tahun 2019 ini, antara lain melaksanakan seminar "Bahasa Ibu" bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Udayana Bali.

Panitia Seminar "Bahasa Ibu" Maria Matildis Banda bertatap muka bersama Sekda Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Rai Iswara, Senin, untuk menyampaikan rencana tersebut kepada pemerintah kota.

Maria Matildis Banda mengatakan bahwa seminar "Bahasa Ibu" tersebut merupakan upaya untuk memperkenalkan kembali kekayaan bahasa ibu salah satunya "Bahasa Bali". Dalam pelaksanaannya yang dijadwalkan pada 22-23 Februari 2019 di Kampus Unud serangkaian menyambut HUT ke-231 Kota Denpasar

dan hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2018.

"Kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kekayaan bahasa di Indonesia khususnya Bahasa Bali yang hingga kini masih menjadi kearifan lokal di Bali," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Maria, bahwa dalam kegiatan ini juga akan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Yakni Prof. James T Collins yang merupakan pembicara utama dari Malaysia, Prof. Dr Multamia RMT Lauder dari Universitas Indonesia, Prof. Oktavianus dari Universitas Halu Oleo dan Dr. Drs. Yapi Taum dari Universitas Sanatana Dharma.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan dan dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal Bali utamanya Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia,"



Panitia seminar "Bahasa Ibu" sekuat bertatap muka dengan Sekda Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara (Antaranews Bali/Komang Suparta)

ujarnya.

Sementara, Sekda Kota Denpasar Rai Iswara menyambut baik pelaksanaan kegiatan Seminar "Bahasa Ibu" tersebut. Bahkan, pihaknya dan Pemkot Denpasar sangat mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan itu.

"Kami sangat mengapresiasi dan siap mendukung suksesnya Seminar Bahasa Ibu ini," kata Rai Iswara.

Lebih lanjut Rai Iswara

mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini tentu sangat sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali dan Surat Edaran (SE) Wali Kota Denpasar Nomor 836 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Pelindungan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Aksara Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali serentak di Kota Denpasar. (ant)

Badung Dorong Sosialisasi Pencegahan Narkoba Hingga Desa



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa saat membuka Sosialisasi Inpres No. 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Puspem Badung, Senin (28/1). Antarabews Bali/Humas Badung

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, mendorong sosialisasi pencegahan narkoba hingga ke desa-desa maupun banjar-banjar di wilayah setempat.

“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini

sudah terjadi hingga ke pelosok desa. Hal ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya para generasi muda,” ujar Adi Arnawa, saat kegiatan Sosialisasi Inpres No.6 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) dilaksanakan di Puspem Badung, Mangupura, Senin.

Ia mengatakan, sosialisasi Inpres Rencana Aksi P4GN itu sangat penting dilakukan, tidak hanya di lingkungan Pemkab Badung saja, namun juga kepada masyarakat terutama bagi para anggota kelompok pemuda di wilayah desa.

“Ini penting dilakukan, mengingat Badung sebagai daerah tujuan wisata sangat rentan terpengaruh narkoba, yang dapat mengakibatkan mental generasi muda kami menjadi merosot,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kabupaten Badung untuk terus mengencakan sosialisasi narkoba ke tingkat desa maupun banjar.

“Itu merupakan tantangan bangsa, tantangan masyarakat serta tantangan bagi Repub-

lik ini, untuk bagaimana dapat memberantas narkoba,” kata Adi Arnawa.

Sementara itu, Kepala BNNK Badung, Ni Ketut Masmini, mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada jajaran Pemkab Badung yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi itu dapat berjalan dengan baik.

“Melalui kegiatan ini kami juga mendorong pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk mengimplementasikan Inpres No.6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi P4GN,” katanya.

“Kami juga ingin menciptakan sekaligus menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berperan aktif sesuai tugas serta kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Inpres tersebut,” ujar Ketut Masmini. (adv)

Badung Ambil Alih Dugaan Klaim Lahan Publik

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengambil alih permasalahan dugaan kasus klaim lahan yang merupakan area publik di kawasan Pantai Jerman, Kuta, Badung.

“Permasalahan ini akan kami ambil alih. Kami akan membentuk tim secara teknis, nanti akan kami gali tunjukkan buktinya dengan kuat. Sehingga keberpihakan kami itu berdasarkan aspek regulasi dan ‘law enforcement’,” ujar Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, saat menemui masyarakat di halaman Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali, Jumat.

Dalam susana dialogis Bupati Giri Prasta dengan ratusan warga Kuta yang hadir di dekat lokasi lahan yang dipermasalahkan itu, pihak hotel tidak ada satupun yang datang menghadiri dialog tersebut.

Hal tersebut sempat menjadi pertanyaan warga, terkait bagaimana dapat menyelesaikan masalah itu tanpa ada

komunikasi dengan pihak hotel.

Namun, menurut Bupati Giri Prasta, pihaknya tidak harus bertemu hotel saat itu juga, sebab tim teknis yang ia bentuk nantinya akan memanggil pihak hotel nantinya.

“Kami sudah pegang data, data ini yang akan dipakai meluruskan. Saya tidak mau masyarakat saya berbenturan dengan hotel dan petugas pengamanan. Biarkan saya yang bertindak,” katanya.

Ia menjelaskan, tim teknis yang dibentuk terdiri dari PUPR, perizinan, BPN dan DPRD Badung yang diwakili I Gusti Anom Gumanti. Tim tersebut akan melakukan rapat, untuk mencari hasil dan kemudian disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

“Saya harap permasalahan ini akan mendapatkan titik terang dalam kurun tidak akan lebih dari dua minggu,” katanya.

Pihaknya mengaku juga



Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, berdialog dengan masyarakat Desa Adat Kuta di kawasan Pantai Jerman, Jumat (18/1). Antaranews Bali/Humas Badung

telah berkomunikasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penida, terkait kegiatan penataan pantai yang dilakukan diatas lahan tersebut.

Selain itu, ia juga telah didampingi Badan Pertanahan Negara Badung, untuk memperjelas kasus tersebut. Dari penelusuran sementara, ia mengaku telah melihat gambaran awal kondisi lahan terkait.

“Gambaran itu akan ditun-

taskan terlebih dahulu, untuk nantinya diperlihatkan kepada publik. Gambaran itu yang nantinya akan menjadi fakta riil bukti atas tanah terkait,” ujar Giri Prasta.

Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Prasta juga mengimbau warga untuk senantiasa menjaga kondusifitas wilayah dengan baik. Sebab Kuta merupakan jantung sari kabupaten Badung. (adv)

Bupati Badung Minta ASN Tingkatkan Kinerja Kerja



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, saat memimpin Apel Paripurna di Lapangan Puspem Badung, Senin (21/1). *Antaraneews Bali/Humas Badung*

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Apa yang menjadi tanggung jawab ASN Pemkab Badung harus dapat diimplementasikan

untuk masyarakat Badung secara baik dan transparan,” ujar Bupati Giri Prasta, saat Apel Paripurna di Lapangan puspem Badung, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta yang didampingi Wabup I Ketut Suiasa, Sekda Badung, I Wayan Adi

Arnawa juga memberikan apresiasi kepada ASN di Lingkungan Pemkab Badung yang berhasil meraih berbagai penghargaan baik tingkat daerah maupun nasional.

“Saya harap ASN Badung juga tidak cepat berpuas diri dengan penghargaan tersebut, tetapi lebih memperkuat persatuan, membangkitkan semangat untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik,” katanya.

Ia mengatakan, program-program yang dilaksanakan Pemkab Badung benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat Badung. Dimana inti dan kerangka dari program PPNSB harus dilakukan dengan merevisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2005-2025.

“Inilah yang menjadi pedoman dalam penyusunan

RPJMD Kab. Badung 2016-2021. Dengan RPJMD ini, OPD akan membuat RKPD yang turunannya menjadi Perda 13 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Badung Semester Berencana 2016-2021. sehingga wajib diimplementasikan oleh ASN untuk masyarakat Badung,” ujar Giri Prasta.

Terkait dengan kinerja, dari pohon kerjanya, Bupati Giri Prasta sebagai pimpinan Pemkab Badung melihat struktur bagaimana tentang ‘input’, proses, ‘output’ dan bagaimana ‘outcome’ dan peran Bupati adalah sebagai feedbacknya.

Dengan selesainya pohon kinerja, tidak ada lagi ego-sektoral antara OPD, semua harus dapat bersinergi sehingga satu kegiatan akan diambil oleh empat OPD dan hasilnya akan menjadi sempurna. (adv)

Pemkab Badung Evaluasi Program Bansos Lansia

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menggelar rapat koordinasi evaluasi berkaitan dengan program bantuan perlindungan sosial lanjut usia dan santunan kematian.

“Dari evaluasi, kedua program tersebut secara umum sudah berjalan dengan baik dan sudah diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Mangupura, Senin.

Wabup Suiasa menjelaskan, program bansos lansia dan santunan kematian itu merupakan salah satu kebijakan politik anggaran yang diberikan untuk masyarakat Badung.

“Untuk kegiatan rapat koordinasi ini kami lakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan tugas koordinatif guna mengetahui capaian maupun kendala yang mungkin masih dihadapi di lapangan,” katanya.

Ia berharap, kedepannya program tersebut dapat lebih ditingkatkan untuk mempermudah masyarakat demi kesempurnaan layanan.

“Dari rakor ini kami simpulkan, masih perlunya adanya sejumlah perbaikan beberapa hal pada Perbup, perubahan prosedur standar operasi yang dapat diintegrasikan, serta perlunya kebijakan khusus dalam menindaklanjuti terjadinya keterlambatan administrasi,” kata Suiasa.

Kepala Dinas Sosial Badung, Ketut Sudarsana mengatakan, program Bansos lanjut usia di Badung diselenggarakan berdasarkan Perbup. No.38 tahun 2018 tentang bantuan perlindungan sosial lanjut usia yang mulai diterapkan bulan September 2018.

Lansia yang berhak mendapatkan bansos adalah masyarakat yang tidak potensial paling rendah berumur 72 tahun, umur 60 tahun keatas



Wabup Badung, I Ketut Suiasa memimpin rapat koordinasi evaluasi berkaitan program bantuan perlindungan sosial lanjut usia dan santunan kematian di ruang Nayaka Gosana II, Puspem Badung, Senin (21/1). *Antaraneews Bali/Humas Badung*

dan tidak berdaya (bedridden).

“Sedangkan yang tidak mendapat bansos yaitu lansia yang sedang menerima pensiun atau santunan dari pemerintah atau lembaga sosial, serta lansia yang menjadi binaan dan tanggungjawab Panti Sosial Tresna Werdha/Panti Sosial,” katanya.

Bantuan itu diberikan sebesar Rp1 juta perorang perbulan dan dicairkan tiga bulan sekali. Selama empat bulan dari September hingga Desember 2018, bansos itu telah diberikan kepada 13.104 orang lansia dengan besaran anggaran lebih dari Rp52,4 miliar. (adv)

DLHK Badung Siap Luncurkan “Green Mangupura Award”



Kepala DLHK Badung, Putu Eka Merthawan. *Antaranews Bali/Humas Badung*

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, Bali, siap meluncurkan “Green Mangupura Award” mengkampanyekan penanganan sampah dan limbah.

“Green Mangupura Award akan diberikan kepada instansi dan industri yang telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kebersihan lingkungannya

dari sampah dan limbah,” ujar Kepala DLHK Badung, Putu Eka Merthawan, di Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan, sektor usaha merupakan salah satu penghasilan sampah paling banyak terkait dengan temuan sampah dan limbah yang diolah dengan tidak maksimal.

“Sektor industri merupakan

sumber sampah hulu yang paling banyak. Hotel penyumbang sampah terbesar di Badung hampir 40 persen sampah terbesar Badung, restoran juga menghasilkan air limbah cair yang banyak,” katanya.

Ia menjelaskan, pada bulan Januari, Februari dan Maret pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait dengan Perbub dan peluncuran Green Mangupura Award. Yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kembali dan pemberian penghargaan pada triwulan terakhir tahun 2019.

“Penghargaan itu mahal dan dapat menjadi nilai jual bagi industri. Seperti hotel yang berhasil meraih penghargaan dapat digunakan untuk mendukung pemasarannya,” kata Eka Merthawan.

Ia menambahkan, penghargaan “Green Mangupura Award” akan diserahkan kepada sejumlah instansi dan

pelaku industri seperti Bandara Ngurah Rai, destinasi wisata, hotel, restoran, pusat perbelanjaan modern, minimarket, pasar tradisional, rumah sakit, puskesmas, catering dan laundry.

“Kriteria penilaiannya contohnya untuk hotel memiliki ISO, pengelolaan limbah dan instalasi pengolahan air limbah yang bagus, pemilahan sampah, dan program-program prolingkungan lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, tim penilai yang dibentuk nantinya akan objektif dalam melakukan penilaian. Sehingga tidak ada istilah suka atau tidak suka dan penilaian akan dilakukan sesuai dengan fakta yang ada.

“Nanti ada tingkatan penghargaanannya, yang bagus yang dapat Gold, ada yang dapat silver. Dan yang jelek akan kami beri ‘punishment’ dan dapat dicabut ijin lingkungannya,” ujarnya. (adv)

Pramuka Kwarcab Badung Tingkatkan Peran Kepramukaan

Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Badung, Bali, menggelar kegiatan rapat kerja sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran dan aktivitas kepramukaan pada kalangan generasi muda.

“Dengan kegiatan ini saya harap Kwarcab Badung dapat meningkatkan peran kepramukaan dalam membangun tunas-tunas muda yang tangguh, mandiri, berdaya saing serta memiliki karakter dan jati diri yang berkualitas,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat membuka kegiatan itu di Kerobokan, Badung, Selasa.

Ketut Suiasa yang juga Ketua Umum Kwarcab Pramuka Badung, mengatakan, pihaknya mengajak seluruh insan Pramuka di Badung untuk berkomitmen bersama guna meningkatkan kualitas pembinaan melalui gugus depan.

“Gugus depan ini merupakan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan yang mengedepankan pendidikan, kepribadian serta menumbuhkan semangat patriotisme serta jiwa bela negara yang juga terkandung dalam dasa darma pramuka,” katanya.

Dalam kegiatan yang diikuti 55 orang peserta tersebut, Ketut Suiasa juga menekankan agar seluruh peserta rapat dapat saling bersinergi sehingga dapat melaksanakan serta menyusun rencana kegiatan Pramuka Kwarcab Badung kedepan dengan baik.

Sementara itu, Ketua Harian Pramuka Kwarcab Badung, I Ketut Widia Astika menjelaskan, tujuan kegiatan itu adalah untuk melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2018 sebagai bentuk pertimbangan dasar penyusunan program-program di tahun mendatang.



Ketua Umum Kwarcab Pramuka Badung, I Ketut Suiasa saat menghadiri rapat kerja di SKB Kerobokan Selasa (29/1). *Antaranews Bali/Humas Badung*

“Untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan Kwarcab Badung yang telah dilaksanakan pada tahun 2018, diantaranya kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar bagi Guru SD, SMP, SMA dan SMK se-Badung,” ujar Widia Astika yang juga merupakan Kadispora Badung itu.

Selain itu, pihaknya telah

melaksanakan Karang Pemitraan Nasional yang diselenggarakan di Lebak Harjo Malang Jatim pada bulan Agustus 2018, kegiatan KML Swadaya pada bulan Januari 2018 di Gereja Perpustakaan Tuka Dalung serta kegiatan orientasi kepramukaan bagi Guru di SMK Pratama Widya Mandala. (adv)

Disdukcapil Badung Luncurkan Kampung GISA



Wabup Badung, I Ketut Suiasa saat menghadiri acara Gerakan Indonesia Administrasi Kependudukan di Banjar Kiadan, Desa Pelaga, Petang, Rabu (30/1). *Antaranews Bali/Humas Badung*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, Bali, meluncurkan Kampung GISA (Gerakan Indonesia Administrasi Kependudukan) di Banjar Kiadan, Desa Pelaga, Badung.

“Melalui GISA, kami akan selalu melakukan verifikasi data kependudukan bersama seluruh jajaran terbawah sampai seperti

kepala lingkungan, untuk memastikan bahwa seluruh penduduk di Badung sudah memiliki administrasi kependudukan lengkap,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menghadiri kegiatan tersebut, Rabu.

Ia mengatakan Pemkab Badung meluncurkan layanan tersebut untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat

dalam pembuatan identitas dan administrasi kependudukan.

“Ini wujud komitmen kami Pemkab Badung dimana kami harus intens dan selalu berbuat, membuka ruang waktu untuk masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik buat masyarakat itu sendiri” katanya.

Pelayanan kependudukan di Kabupaten Badung, menurut Suiasa, untuk gerakan jemput bola sudah tidak lagi dilakukan di desa atau banjar namun sekarang dilakukn secara “door to door”.

“Itu akan sangat membantu pelayanan identitas kependudukan bagaimanapun kondisi masyarakat seperti, kondisi sakit tidak dapat bangun dan lansia, itu akan dilayani di rumahnya, petugas dari Pemkab Badung yang akan datang melayani,” katanya.

“Itu juga berlaku bagi masyarakat berada di Rumah Sakit Jiwa sampai di penjara

akan kami datang untuk membuat identitas penduduk. Oleh karena itu, dengan kemudahan pelayanan yang kami berikan, saya mengimbau seluruh masyarakat jangan sampai tidak mengurus administrasi kependudukan,” ujar Wabup Suiasa.

Sementara itu, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung, Nyoman Soka, mengatakan, Kampung GISA diharapkan dapat membangun ekosistem pemerintah dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan serta dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.

“Untuk manfaat Kampung GISA diantaranya adalah untuk membantu masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan, pemuktakhiran data penduduk, pemanfaatan data kependudukan untuk semua kepentingan,” ujarnya. (adv)

DPRD Bali Samakan Persepsi Dengan Badung Terkait Perubahan Perda RTRW

Jajaran DPRD Provinsi Bali mengunjungi Pusat Pemerintahan Badung untuk menyamakan persepsi terkait rencana perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali tahun 2009-2029 dengan pemkab setempat (29/1).

“Kehadiran kami ini dalam rangka kunjungan kerja terkait rencana perubahan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Bali. Sebelumnya kami sudah mendatangi Denpasar dan dilanjutkan ke Tabanan untuk menyerap usulan-usulan di setiap daerah,” ujar Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dalam keterangan resmi yang diterima di Mangupura, Rabu.

Dalam kunjungan kerja itu (29/1), ia menjelaskan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sudah selayaknya direvisi mengingat sudah lama belum disesuaikan. Sesuai ketentuan, Perda RTRW perlu

ditinjau kembali dalam setiap lima tahun.

Menurut dia, dinamika perubahan kebijakan nasional dan dinamika internal di Provinsi Bali perlu diakomodasi dan diharmoniskan, dan diintegrasikan dalam konsep Pembangunan Bali selanjutnya. “Perda ini sudah 10 tahun, jadi perlu ditinjau kembali. Seperti ketinggian bangunan dan kawasan suci,” kata Adi W.

Sementara itu, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyambut baik upaya legislator Provinsi Bali yang melakukan kunjungan kerja guna menyerap aspirasi di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan rencana pembangunan di Kabupaten Badung. Salah satunya, mega-proyek jalan lingkaran selatan.

Untuk jalan lingkaran, Pemkab Badung tahun 2019 mulai melakukan pengukuran tanah-



Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Ketut Suiasa menerima Jajaran DPRD Provinsi Bali di Ruang Rapat Bupati, Selasa (29/1). *Antaranews Bali/Humas Badung*

tanah yang terkena pembebasan. Ini progres yang akan dilakukan sebelum melakukan Detail Engineering Design (DED).

“Kami juga tetap fokus pada program-program yang telah berjalan seperti sekolah gratis, program bidang kesehatan dan program penguatan adat dan program penguatan budaya,”

ujarnya.

Bupati Giri Prasta juga menyikapi rencana terkait adanya revisi ketinggian bangunan di atas 15 meter. “Kalau ketinggian bangunan, kami di Badung kurang sepatutnya melebihi batas ketinggian, karena sama artinya kita melakukan pengingkaran terhadap warisan,” ujarnya. (adv)

Badung Jemput Bola Layani Administrasi Kependudukan



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat menghadiri peluncuran Kampung GISA di Wantilan Pura Luhur Gede Batu Ngau, Desa Cemagi, Mengwi, Kamis (31/1). *Antaraneews Bali/Humas Badung*

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, melakukan sistem jemput bola dalam pelayanan administrasi kependudukan masyarakat.

“Untuk layanan administrasi kependudukan, tidak hanya dilakukan di dinas atau kantor maupun di kecamatan saja, na-

mun sudah bisa ke masing-masing rumah warga,” ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, saat peluncuran Kampung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kecamatan Mengwi, Badung, Kamis.

Ia menjelaskan, pelayanan secara jemput bola itu dilakukan seperti dengan melayani warga

yang sakit dan lansia yang sudah tidak dapat mengurus secara pangsung di kantor.

“Layanan itu dilakukan termasuk bagi warga Badung yang ada di Rumah Sakit Jiwa Bangli, maupun warga Badung yang terkena masalah hukum di Lapas juga kami layani,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya menginginkan agar seluruh masyarakat Badung memiliki administrasi kependudukan secara lengkap yang akan dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa dari program pemerintah tanpa adanya administrasi kependudukan yang lengkap,” kata Suiasa.

Terkait dengan pencanangan Kampung GISA di Badung, menurutnya itu merupakan bukti bahwa jajaran Pemkab Ba-

dung bersama aparat desa dan banjar telah sepakat untuk melayani masyarakat agar semua memiliki administrasi kependudukan lengkap, seperti KK, e-KTP serta akta-akta.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Badung, Gede Purna menjelaskan, peluncuran Kampung GISA itu mengambil motto “Laksanakan, melayani masyarakat dengan hati, sepenuh hati dengan program pelayanan Badung AKU SAPA (Badung Administrasi Satu Paket), seperti akte kelahiran, perkawinan perceraian, kematian dan satu paket pembuatan KK, KTP dan lainnya”.

Ia berharap, GISA dapat meningkatkan ekosistem pemerintahan serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan, menuju Indonesia sadar administrasi. (adv)

ASN Badung Ikuti Penilaian Kompetensi JPTP

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

“Pelaksanaan penilaian ini merupakan salah satu prasyarat dalam pengembangan karier ASN khususnya yang memangku jabatan tinggi pratama,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa, di Mangupura, Kamis.

Ia berharap, para peserta agar serius mengikuti penilaian tersebut meskipun nantinya tidak ada istilah lulus maupun tidak lulus.

“Yang paling penting, ini akan menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan jabatan yang cocok untuk jabatan pimpinan tinggi pratama,” kata Adi Arnawa.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku

asesor, yang telah diajak kerjasama dalam penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi jabatan tinggi pratama yang dilaksanakan selama dua hari itu.

Kabid Pengembangan SDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, Agus Suantara mengatakan, penilaian tersebut sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN bahwa implementasi manajemen ASN yang bertujuan agar pejabat memiliki integritas, kompetensi dan mampu mengelola segala perbedaan budaya, latarbelakang suku, agama, serta seluruh kepentingan elemen bangsa.

“Salah satu upaya mencapai hal tersebut dilakukan penilaian kompetensi JPTP dengan sistem “assessment center”. Kegiatan ini menjadi sumber data dalam menunjukkan potensi dan kompetensi ASN,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan



Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa menghadiri pembukaan penilaian potensi dan kompetensi ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Badung, di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Puspem Badung Kamis (31/1). *Antaraneews Bali/Humas badung*

itu juga untuk menggali potensi dan kompetensi para peserta sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi guna perkembangan ASN yang bersangkutan maupun perkembangan instansi.

Sementara itu, Kabid Pemetaan, Kompetensi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN, LAN, Zulfikar mengatakan, pemetaan kompetensi itu berlaku selama dua tahun

dan setelah dua tahun akan dilakukan kembali.

“Pemetaan kompetensi ini juga menjadi salah satu prasyarat jabatan dalam pengembangan karier,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan PermenPANRB No. 8 tahun 2017 untuk kompetensi manajerial ada delapan kompetensi manajerial yang diukur dan satu kompetensi sosiokultural. (adv)

Desa Mas Ubud Mesra Dengan Desa Misato, Jepang



Penandatanganan MoU antara Desa Mas, Ubud dengan Desa Misato Cho, Jepang di Wantilan Pura Taman Pule Mas, Ubud, Gianyar (Dok Humas)

Hubungan persahabatan antar dua desa dari dua negara berbeda yang terjalin selama 25 tahun lamanya, kini dipererat lagi melalui kerja sama di berbagai bidang yang dituangkan dalam penandatanganan MoU antara Desa Mas, Ubud dengan Desa Misato Cho, Jepang di Wantilan Pura Taman Pule Mas, Ubud, Gianyar, Rabu. Perbekel Desa Mas Ubud

Wayan Gede Dharma Yuda mengatakan dalam kerja sama ini pihaknya menginginkan menguntungkan kedua desa, khususnya di bidang usaha pertanian, pariwisata, tenaga kerja, seni budaya, dan lainnya, demikian keterangan pers Diskominfo, Rabu.

Sebab, merunut pengalaman dia berkunjung ke Desa Misato, sangat luar biasa ber-

sih, pemandangan indah, begitu juga penduduknya sangat ramah. Yang paling luar biasa tentu cara pengolahan sampah sangat sempurna, sehingga TPA disana hampir tidak ada sampah berserakan. "Kami sangat ingin meniru cara mereka," ucapnya.

Pria beristrikan wanita Jepang itu juga berharap, dapat saling membantu, seperti contoh Desa Misato unggul di bidang pariwisata air panas membutuhkan tenaga terapis atau pelatih Spa, tari, tenaga pertanian, pihaknya siap mengirimkan tenaga profesional dari Desa Mas. Begitu juga sebaliknya, jika mereka hendak belajar tari, seni patung, tentu pihaknya akan menerima dan mengajarkan dengan senang hati.

Kepala Desa Misato Cho, Kado Takashi menyampaikan rasa kagumnya terhadap kehidupan bermasyarakat di

Bali, begitu juga keindahan alamnya. Khususnya di Desa Mas. Disampaikannya, saat ini sudah banyak orang saling mengunjungi antara Desa Mas dan Desa Misato demi memperdalam pertukaran mereka.

"Kami berharap ke depannya, hubungan antar kedua desa bisa langgeng, dan dapat memberi kontribusi positif dalam perkembangan masing-masing negara, kami kagum dengan pesona keindahan kebudayaan yang ada di Desa Mas" kata dia.

Asisten I Setda Kabupaten Gianyar Wayan Suardana menyampaikan, Pemda Gianyar akan mendukung penuh kerja sama ini. Sebab, manfaat yang didapat sangat banyak di berbagai bidang. Terutama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, juga peningkatan kualitas pelayanan publik. (ant)

Bupati Gianyar Canangkan 2019 Sebagai Tahun Kebangkitan

Bupati Gianyar Mahayastira menyatakan tahun 2019 sebagai tahun tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar, karena pihaknya telah mencanangkan tahun 2019 sebagai Tahun Kebangkitan Kabupaten Gianyar.

"Hal ini dilihat dari APBD Kabupaten Gianyar yang mencapai Rp2,6 miliar. Begitu juga dengan pembangunan yang dilaksanakan seperti pembangunan rumah sakit, pasar, penataan kota Gianyar, pembangunan desa pakraman serta yang lainnya," katanya dalam sambutan pada peringatan HUT ke-1 Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) Kabupaten Gianyar (27/1) sebagaimana keterangan pers Diskominfo Gianyar, Senin.

Menurut dia, pencanangan itu perlu dukungan yang besar dari pihak, karena target APBD yang dirancang senilai Rp1 triliun perlu dikawal

setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. "Jadi, nanti ada deklarasi-deklarasi yang saya inginkan dari kades-kades. Deklarasi semua Wajib Pajak memegang NPWP," kata Bupati dalam acara yang ditandai dengan pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Perbekel/Lurah se-Kabupaten Gianyar, pelepasan enam orang Kepala OPD yang sudah purna tugas, serta penyerahan secara simbolis bantuan 30 meja Tennis Meja kepada Sekaa Teruna se-Kabupaten Gianyar.

Peringatan HIT ke-1 FK BPD Gianyar itu dimeriahkan dengan jalan santai berhadiah bekerjasama dengan Bank Werdhi Sedana Gianyar yang diikuti oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastira, Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab Gianyar, Sekdakab Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya, pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab



Bupati Mahayastira menyerahkan bantuan peralatan tenis meja kepada pengurus Forum Komunikasi Perbekel/Lurah se-Kabupaten Gianyar (Dok Humas)

Gianyar, perangkat desa/kelurahan se-Kabupaten Gianyar serta masyarakat umum, lalu donor darah yang dilakukan oleh PMI.

Menurut Bupati Gianyar I Made Mahayastira, BPD dalam konteks pemerintahan desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama kepala desa/perbekel. BPD memiliki peran dalam

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa melalui musyawarah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Keberadaan forum ini dapat menjadi wadah saling bertukar pikiran sesama anggota mengenai berbagai masalah maupun upaya-upaya dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa. (ant)

Segera Buat Perda, Bupati Jadikan Bunga Gumitir Sebagai Maskot Bangli



Tari Sekar Gumitir yang makin memantapkan Bupati Bangli I Made Gianyar menetapkan bunga Gumitir sebagai maskot Kabupaten Bangli (Dok Humas)

Bupati Bangli I Made Gianyar akan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk menjadikan Bunga Gumitir sebagai maskot Kabupaten Bangli.

Hal ini disampaikan Bupati Made Gianyar usai menyaksikan uji coba perdana tari maskot Kabupaten Bangli “Sekar Gumitir” di Wantilan Desa Wisata Pengli-

puran, Senin (28/1), demikian siaran pers Diskominfo Bangli, Selasa.

Lebih lanjut Bupati Made Gianyar menjelaskan sebelumnya gagal menjadikan Bunga Pucuk Bang dan Sandat sebagai maskot Kabupaten Bangli, karena kalah cepat dari kabupaten lainnya (Bunga Pucuk Bang

dipakai Kabupaten Gianyar, Bunga Sandat dipakai Kabupaten Tabanan), kini Bupati Made Gianyar tidak mau kecolongan lagi.

Setelah menyaksikan langsung uji coba Tari Sekar Gumitir dan berdiskusi dengan beberapa budayawan, ia mengaku tidak ragu menjadikan Bunga Gumitir sebagai maskot Kabupaten Bangli.

Ia mengatakan selain memiliki warna yang indah, Gumitir juga memiliki makna yang mendalam. Selain melambangkan kesederhanaan, gumitir juga memiliki banyak manfaat, tahan lama, tidak mahal, dan yang tidak kalah penting, gumitir sangat cocok hidup didaerah sejuk seperti Kabupaten Bangli.

Menurut dia, selain memiliki fungsi ekonomi, agama dan seni, Gumitir juga mempunyai nilai religius, kemuliaan, keindahan dan kemasyarakatan. Dengan memilih Bunga Gumitir

sebagai maskot, ia berharap segala sesuatu yang baik dan berguna tidak sulit didapatkan di Kabupaten Bangli.

“Setelah menyaksikan uji coba hari ini, satu kata, Bunga Gumitir sangat cocok untuk Maskot Kabupaten Bangli. Ini akan saya tidak lanjut dengan Perda”terangnya.

Ia menambahkan Bunga Gumitir saat ini cukup trend dan hampir dikembangkan diseluruh wilayah di Bali. Karena memiliki nilai ekonomis dan multi fungsi, Bupati Made Gianyar juga berencana membuat pelatihan dupa menggunakan bahan baku Gumitir. Sehingga saat harga Gumitir murah, masyarakat bisa mengolah Gumitir untuk dijadikan dupa. “Saat murah, masyarakat bisa mengolah Gumitir menjadi bahan dupa. Jadi secara ekonomis ini sangat menguntungkan”pungkasnya. (ant)

BTB Harapkan “Balingkang Kintamani Festival” Jadi Magnet Wisatawan Tiongkok

Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengharapkan ajang “Balingkang Kintamani Festival 2019” akan dapat menjadi “magnet” lebih banyak wisatawan asal Tiongkok ke Pulau Dewata.

“Kami berharap dengan kegiatan “Balingkang Kintamani Festival” yang digelar 6 Februari mendatang akan dapat ke depannya menyedot wisatawan Tiongkok lebih banyak,” katanya di sela seminar bertema “Meningkatkan dan Mempererat Hubungan Budaya masyarakat Bali dan China” di Sanur, Bali, Rabu.

Ia mengatakan dengan kegiatan tersebut juga akan dapat mengangkat potensi di daerah sekitar Batur Kintamani, Kabupaten Bangli. “Wisatawan Tiongkok sejauh ini hanya menikmati atraksi wisata alam, dan belum mengenal lebih jauh

kebudayaan Pulau Dewata. Oleh karena itu melalui festival tersebut khasanah budaya Bali dan China akan lebih dikenal,” ujarnya.

Menurut Partha Adnyana, akulturasi budaya Bali dan Tiongkok sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dibuktikan dengan adanya situs kerajaan Balingkang di Bali. Dengan adanya Balingkang Kintamani Festival ini, wisatawan Tiongkok akan diperkenalkan dengan kebudayaan Bali serta bagaimana budaya tersebut pernah berinteraksi dengan kebudayaan Tiongkok.

Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Bali Liang, dan tamu dari Tiongkok sekitar 2.000 wisatawan yang ada di Bali diarahkan ke Batur. Festival ini akan menekankan pada akulturasi budaya Bali dan Tiongkok melalui kisah percin-



Jumpa pers “Balingkang Festival Kintamani” di Sanur, Bali. (Antaraneews Bali/Komang Suparta)

taan segitiga antara Raja Jaya Pangus, Putri Kang Cing We, dan Dewi Danu yang dikemas dalam bentuk parade budaya.

Partha Adnyana menambahkan untuk memaksimalkan festival ini, akan disediakan pemandu wisata yang berbahasa Mandarin untuk mengkomunikasikan inti cerita kepada para wisatawan. Cerita juga akan dipadukan dengan bukti langsung peninggalan kerajaan Balingkang di Kintamani seperti kawasan pura sehingga pertunjukan ini akan menjadi

pengalaman yang unik untuk dinikmati wisatawan Tiongkok.

Diharapkan “Balingkang Kintamani Festival” bisa menjadi langkah awal revitalisasi pasar wisatawan Tiongkok di Bali yang sebelumnya sempat mengalami penurunan. Karakteristik wisatawan asal Tiongkok yang banyak mengandalkan rekomendasi dari keluarga dan kerabat serta ulasan sosial media saat memilih sebuah destinasi untuk berlibur, diperlukan strategi publikasi yang tepat. (ant)

Pemkab Klungkung Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Pariwisata



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menjalin kerjasama dengan STP Bali lewat penandatanganan nota kesepakatan, Selasa (22/1). (Antaraneews Bali/Humas Klungkung)

Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang pariwisata.

“Kerjasama ini sebagai implementasi tri dharma perguruan tinggi. Lewat kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pari-

wisata Bali ini, kami berharap bisa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang pariwisata,” kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, saat penandatanganan MoU atau nota kesepakatan dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, Selasa.

Selain sumberdaya manusia, ia mengatakan, kerjasama ini

juga merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan informasi pariwisata sesuai dengan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Klungkung.

“Apa yang ada di perguruan tinggi bisa di implementasikan nanti ke lapangan, baik itu menciptakan potensi baru maupun memanfaatkan potensi yang sudah ada,” katanya.

Sementara Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bali (STP) Bali Dewa Gede Ngurah Byomantra mengatakan, Kabupaten Klungkung memiliki potensi besar di bidang pariwisata, yang melalui penandatanganan MoU ini, STP Bali bisa memperluas area pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat di bidang pariwisata yang juga

bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa.

“Mudah-mudahan kami selaku lembaga pendidikan, mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Klungkung,” katanya.

Tidak hanya menandatangani nota kesepakatan, dalam kesempatan ini Suwirta juga menjadi motivator atau narasumber dengan memberikan kuliah umum tentang kewirausahaan bagi mahasiswa STP Bali.

Turut hadir dalam acara penandatanganan nota kesepakatan di Gedung Widyatula, Kampus STP Nusa ini, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Klungkung Ida Bagus Sudarsana, semua staf ahli bupati, mahasiswa STP Bali dan undangan lainnya. (ant)

Klungkung Kembangkan Wisata “Adventure”

Pemkab Klungkung siap mengembangkan wisata “adventure” (petualang) di wilayahnya yang mengadopsi konsep Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mencoba tur wisata “off road” Merapi.

“Selain budaya, laut, dan terumbu karang, Kabupaten Klungkung memiliki wilayah yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata adventure seperti di Yogyakarta. Seperti kawasan bukit tengah dan bukit abah di Kecamatan Dawan dan kawasan menuju Puncak Mundi di Kecamatan Nusa Penida,” kata Bupati Suwirta di Klungkung, Bali, Minggu.

Ia menjelaskan kawasan dengan kontur perbukitan ini bisa dikemas menjadi destinasi wisata “adventure” yang dilengkapi dengan kendaraan “off road”. “Kita memiliki kawasan yang hampir sama

yang bisa dikembangkan seperti di Yogyakarta,” kata Suwirta.

Orang nomor satu di Pemkab Klungkung ini menyatakan, dalam mengembangkan daerah perlu mencoba konsep tujuan/destinasi wisata baru, sehingga wisatawan yang datang ke Klungkung tidak cepat jenuh.

Selain itu, dengan adanya konsep dan pengembangan destinasi wisata baru akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. “Belajar dari sini saya akan mengajak masyarakat khususnya pegiat pariwisata untuk membahas ini,” ujarnya.

Menurut Bupati, langkah memulai sesuatu yang baru memang tidak mudah. Beragam tanggapan muncul di masyarakat. Untuk itu, dalam membuat konsep harus dilakukan dengan duduk bersama, untuk mengembangkan daerah dengan daya tarik yang



Bupati Klungkung Nyoman Suwirta (kanan) beserta keluarga sedang mencoba wisata adventure di Klungkung, Bali, Minggu (27/1). Foto Humas Pemkab Klungkung

dimiliki.

“Dalam membuat konsep, kita harus kumpul bersama-sama untuk mengembangkan daerah kita,” katanya.

Tahun 2019, Pemkab Klungkung berencana melakukan pengembangan terhadap tujuh tujuan/destinasi wisata,

yakni Pantai Atuh di Desa Pejukutan, Pantai Swehan dan Bukit Teletubies di Desa Tanglad, Pantai Broken Beach dan Tebing Klingking di Desa Bunga Mekar, serta Tirta Harum di Desa Nyalian dan Tirtha Dedari di Desa Getakan, Banjarangkan. (ant)

Wabup Karangasem Tinjau Korban Longsor

Wakil Bupati Karangasem, Bali Wayan Artha Dipa, meninjau keluarga korban bencana longsor yang menewaskan dua warga di Dusun Jatituhu, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Bali pada Minggu (27/1) malam.

Wakil Bupati Karangasem Artha Dipa di Karangasem, Senin, mengaku turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga meninggal dunia.

“Saya turut prihatin dan belasungkawa atas dua warga kami yang meninggal dunia saat musibah tanah longsor di Dusun Jatituhu,” ucapnya.

Wabup Artha Dipa didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, melayat ke rumah duka atas nama Ni Ketut Puspa Wati (28) dan Ni Komang Mertini (19).

Artha Dipa dalam kesempatan tersebut menyerahkan

sejumlah bantuan di antaranya selimut, matras dan perlengkapan lainnya untuk digunakan selama proses evakuasi, serta bantuan berupa sembako dan makanan ringan kepada para korban.

Wabup Artha Dipa meminta agar warga sekitar tetap waspada, jika berada di daerah rawan longsor, maka masyarakat diminta mengungsi terlebih dahulu.

“Tadi kami sudah melihat-lihat kondisi tanah longornya. Kita semua tidak tahu kapan bencana akan terjadi, apalagi sekarang musim hujan. Ikhlaskan harta benda yang rusak, harta bisa dicari yang penting selamatkan diri dulu,” ucapnya.

Dalam peristiwa tanah longsor tersebut, Ni Ketut Puspa Wati meninggal di tempat kejadian, sedangkan Ni Komang Mertini yang kondisinya masih sadar langsung dievakuasi ke



Wakil Bupati Karangasem Wayan Artha Dipa saat menyerahkan bantuan kepada keluarga korban tanah longsor di Kecamatan Kubu. (Antaranews Bali/Komang Suparta/Humas Karangasem)

Puskesmas Kubu 1 dengan menggunakan mobil pickup milik warga setempat, namun Ni Komang Mertini meninggal sesudah mendapatkan penanganan di Puskesmas Kubu.

Selain korban meninggal dunia terdapat pula korban luka-luka di antaranya Ketut

Sukratawan, Ni Wayan Ari (9), I Kadek Arik Wirawan (4), Kadek Jirna, Gede Napendra (10), Kadek Nitasari (7), I Nyoman Andre (12), Nengah Darpa (30), Ni Nyoman Wagi (30), Kadek Sintya (4) I Nengah Suarta (27), dan Ni Nyoman Mariani (25). (ant)

Bupati Karangasem Raih “Adhitya Karya Mahatva Yodha”



Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri saat menerima penghargaan Karang Taruna didampingi Wabup Artha Dipa di Bandarlampung. (Antaranews Bali/Komang Suparta/Humas Karangasem)

Bupati Karangasem, Bali I Gusti Ayu Mas Sumatri, meraih “Adhitya Karya Mahatva Yodha Award 2018” atas dedikasinya sebagai pembina umum Karang Taruna terbaik tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

“Kami bersyukur mendapatkan penghargaan tersebut. Karena selama ini terus melakukan upaya untuk

membangkitkan keberadaan organisasi karang taruna. Ini hadiah bagi saya dan masyarakat Kabupaten Karangasem serta Karang Taruna di Karangasem agar terus maju dan berkembang,” katanya di Karangasem, Senin.

Ia mengatakan penghargaan cukup bergengsi tersebut sudah diterima di Gedung Sumpah Pemuda Bandarlampung yang diserahkan oleh

Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin MSI pada Sabtu (26/1) lalu.

Acara tersebut dihadiri Direktur Pemberdayaan Sosial Bambang Mulyadi, Ketua umum Karang Taruna Nasional Didi Muhriyanto, Gubernur dan Bupati/Wali Kota Se-Indonesia serta undangan lainnya.

Mas Sumatri mengatakan penganugerahan “Satya Lencana Aditya Karya Mahatva Yodha” tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat kepada kepala daerah yang dianggap telah peduli terhadap perkembangan dan kemajuan Karang Taruna di daerah masing-masing.

Bupati Karangasem Mas Sumatri mengatakan upaya membina dan membimbing seluruh organisasi di Karangasem adalah kewajiban

dirinya sebagai kepala daerah.

Menurut dia, karang taruna bersama pemerintah daerah, harus saling mendukung dalam memajukan pembangunan. “Karang taruna harus bersinergi dengan pembangunan di desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Mengenai Karang Taruna, Mas Sumatri berpendapat bahwa Karang Taruna merupakan mitra potensial dan strategis bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

“Peran dan ide kreatif seluruh pengurus Karang Taruna di Karangasem sangat dibutuhkan bagi Kabupaten Karangasem. Untuk itu, semoga ke depannya, Karang Taruna Karangasem mampu terus menerus memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial,” ucapnya. (ant)

Masyarakat Jembrana Diminta Waspada Cuaca Buruk

Masyarakat Kabupaten Jembrana, Bali diimbau untuk waspada terhadap cuaca buruk, yang dapat menyebabkan bencana dan kerusakan rumah tinggal mereka.

Imbauan itu disampaikan Bupati Jembrana I Putu Artha saat mengunjungi Sumiati (46), warga Dusun Summersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Selasa, yang atap rumahnya rusak karena terjang an angin puting beliung Senin (21/1) sore lalu.

“Cuaca buruk termasuk angin kencang sering datang mendadak belakangan ini. Kami imbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan,” kata Artha didampingi Ketua DPRD I Ketut Sugiasa, serta pejabat terkait lainnya.

Menurut dia, bencana yang menimpa pemukiman seringkali disebabkan curah hujan yang

tinggi serta angin kencang, yang bisa mendatangkan bencana banjir, tanah longsor serta kerusakan rumah warga.

Untuk mengantisipasi keselamatan rumah maupun penghuninya, ia minta, warga untuk menebang pohon besar di sekitar rumahnya yang rawan roboh.

“Atau kalau tidak mampu menebang sendiri bisa menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk membantu menebangnya. Segala hal yang berpotensi menimbulkan bahaya harus kita jauhi,” katanya.

Kepada Sumiati, selain memberikan motivasi untuk sabar menghadapi musibah ini, ia juga memberikan bantuan material seperti sembilan kebutuhan pokok, pakaian dan kelengkapan tidur.



Bupati Jembrana I Putu Artha mengunjungi warganya yang atap rumahnya rusak karena diterjang angin puting beliung, Selasa (22/1). (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi)

Sumiati sendiri mengatakan, saat angin puting beliung datang sekitar pukul 16.00 wita, cuaca cerah dan tidak ada hujan sehingga ia tidak menyangka bencana akan datang ke arah rumahnya.

“Angin kencang tahu-tahu datang membuat belasan atap rumah saya yang terbuat dari asbes beterbangan. Meskipun panik, saya berhasil menyelamatkan diri keluar rumah,” katanya. (ant)

Dinas Perdagangan Jembrana Temukan Kosmetik Berbahaya



Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi menunjukkan minuman beralkohol yang diedarkan penjual tanpa memiliki izin saat melakukan razia, Senin (21/1) (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi)

Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi Jembrana kembali menemukan kosmetik berbahaya, bahkan oleh penjual yang sebelumnya sudah terkena razia.

“Ada lima warung yang sebelumnya sudah mendapatkan peringatan karena menjual produk berbahaya, sekarang kami temukan menjual produk yang sudah dilarang. Kalau masih membandel, kami akan menggandeng kepolisian untuk melakukan proses hukum lebih lanjut,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi Jembrana Made Budhiarta, usai pemeriksaan di sejumlah warung dan toko di Kecamatan Negara, Senin.

Ia mengatakan setelah menemukan kembali produk berbahaya dengan penjual yang sama, selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan serta kepolisian jika dibutuhkan.

Menurutnya dia, pemerintah tidak akan mentoleransi

peredaran produk berbahaya baik obat, kosmetik maupun makanan, karena akan merugikan kesehatan masyarakat sebagai konsumennya.

Dalam razia di sejumlah warung dan toko, selain kosmetik berbahaya, petugas juga menemukan makanan dan minuman kadaluarsa serta peredaran minuman beralkohol oleh pedagang yang tidak memiliki izin.

“Untuk dapat menjual minuman beralkohol, pedagang harus memiliki izin. Kami menemukan sejumlah pedagang tidak berizin menjual minuman keras,” kata Budhiarta.

Khusus kosmetik, ia mengungkapkan yang banyak ditemukan adalah krim pemutih wajah yang peredarannya dilarang BPOM karena mengandung merkuri yang membahayakan kulit.

Seperti biasa, pemilik warung berdalih mereka tidak tahu produk kosmetik itu berbahaya, dan berjanji tidak akan menjualnya lagi. (ant)

Berpenumpang 1.050 wisatawan, Kapal Pesiar Sandar di Buleleng

Dinas Kebudayaan (Disbud) Buleleng mementaskan seni topeng dan barong di Gedung Sasana Budaya Singaraja pada setiap hari Jumat siang sebagai tambahan atraksi wisata dan budaya di Bali utara.

“Minggu ini pementasan digelar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019. Nantinya, pementasan dilakukan rutin setiap hari Jumat mulai pukul 11 siang,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Drs. Gede Komang, M.Si., di Singaraja, Buleleng, Bali, Selasa.

Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan ekonomi kreatif, pemajuan seni dan budaya untuk bisa memberikan daya dukung pariwisata di Buleleng. Kesenian ini dipentaskan oleh pimpinan dan juga staf Dinas Kebudayaan.

“Seni yang dimainkan akan diutamakan topeng dan barong, tetapi kami juga akan melihat selera tamu nantinya, jika memungkinkan akan pentas

juga tari-tarian yang lain,” katanya.

Gede Komang menambahkan, pagelaran seni topeng dan barong ini juga sebagai upaya untuk menjadikan Gedung Sasana Budaya sebagai salah satu destinasi wisata kota, sehingga para tamu yang ingin ke kota Singaraja akan bisa menikmati pertunjukan seni yang rutin setiap Jumat ini.

“Karena rutin diadakan setiap Jumat, maka para tamu yang datang ke kota tidak lagi melihat jadwal pagelaran seni, tetapi mereka sudah tahu pasti jam berapa dan hari apa akan ada pertunjukan di Gedung Sasana Budaya,” katanya.

Untuk pembiayaan pagelaran seni itu, Kadisbud Gede Komang akan berkonsultasi dengan Bupati Suradnyana. Rencananya, pihaknya akan menggunakan donasi dari tamu yang datang untuk menutup biaya operasional.

“Tamu yang datang nantinya



Kapal pesiar MS Maasdam berpenumpang 1.050 orang wisatawan dari mancanegara bersandar di Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Senin. (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana)

tidak wajib bayar, melainkan dengan donasi secara sukarela. Kami juga tidak mengangarkan dana untuk kegiatan ini, karena pameran seni juga dilakukan oleh staf kami,” katanya.

Pada 15 Mei 2018, Buleleng kehilangan seniman topeng bondres Made Ngurah Sadika yang dikenal dengan nama Susik, karena tutup usia pada umur 54 tahun pada tanggal itu sekitar pukul 04.30 Wita. (ant)

Pemkab Buleleng Bantu Biaya Penguburan Empat Korban Longsor



Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjindra saat menyerahkan bantuan secara langsung yang diterima oleh perwakilan keluarga korban (29/1). (Foto Antaranews Bali/Made Adnyana)

Pemkab Buleleng membantu biaya upacara penguburan bagi empat warga yang meninggal dunia sebagai korban longsor di Dusun Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali.

Keterangan resmi dari Humas Pemkab Buleleng yang diterima di Singaraja, Rabu,

menyebutkan bantuan yang diserahkan Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjindra itu berupa uang tunai sebesar Rp10 juta dan sembako.

“Kami turut berduka cita atas musibah ini, semoga keluarga ditabahkan,” kata Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjindra saat menyerahkan bantuan secara langsung yang diterima

oleh perwakilan keluarga korban (29/1).

Dalam kesempatan itu, Wabup Sutjindra mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah tebing yang sangat curam untuk menjauh atau mengungsi sementara, selama cuaca buruk, karena sangat berisiko dengan adanya kemungkinan longsor.

Bencana tanah longsor yang terjadi pada Selasa (29/1) di Desa Mengening, Kabupaten Buleleng, sekitar pukul 05.00 Wita telah menelan korban jiwa empat orang yakni Ketut Budikaca (33) beserta istrinya Luh Sentiani (27), dan dua anaknya yang bernama Putu Rikasih (9) dan Kadek Utama (5).

Kepala BPBD Buleleng, Ida Bagus Suadnyana, mengatakan selain faktor cuaca yakni hujan lebat, maka kondisi lahan yang labil dan gembur

juga menjadi faktor penyebab terjadinya longsor di kawasan Desa Mengening itu.

“Kondisi lahan memang tanahnya gembur, dan kami lihat sudah ada upaya bagi pemilik untuk menanam tanaman keras seperti cengkih. Cuma pohon cengkih masih kecil-kecil,” katanya.

Menurut Suadnyana, hasil koordinasinya dengan BPBD Provinsi Bali menyepakati setiap korban meninggal akan diberikan santunan sebesar Rp15 juta. “Kalau bangunan yang rusak akibat bencana nanti akan dicek sama Dinas Perkimta,” katanya.

Suadnyana juga mengimbau agar warga di sekitar lokasi bencana longsor itu tidak menghuni rumah yang posisinya berada di atas tebing. Terlebih, tebing di sampingnya sudah longsor, sehingga rawan terjadi longsor susulan. (ant)